

MODUL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)

Prof. Dr. Novita Tresiana

Bab 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. IKK merupakan alat evaluasi berbasis bukti yang membantu pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan memahami efektivitas kebijakan mereka serta memberikan informasi untuk perbaikan ke depannya.

1.2 Tujuan Modul

Modul ini dirancang untuk membekali pembaca dengan pemahaman mendalam tentang cara melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), dengan fokus pada:

- Pengenalan konsep dasar IKK.
- Proses pengukuran IKK.
- Metode dan alat yang digunakan dalam pengukuran.
- Studi kasus penerapan IKK dalam kebijakan publik di Indonesia.

1.3 Sasaran Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami konsep dan pentingnya IKK dalam evaluasi kebijakan.
- Menerapkan metode pengukuran IKK dalam berbagai kebijakan publik.
- Menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengukuran IKK.

Bab 2: Konsep Dasar Indeks Kualitas Kebijakan

2.1 Pengertian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

IKK adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik secara holistik, baik dalam proses formulasi, implementasi, maupun dampak kebijakan. IKK mengukur kebijakan melalui dimensi-dimensi utama seperti relevansi, konsistensi, efektivitas, efisiensi, dampak jangka panjang, dan partisipasi publik.

2.2 Pentingnya IKK dalam Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang tidak dievaluasi secara sistematis berpotensi gagal mencapai tujuan yang diinginkan, menyia-nyiakan sumber daya, dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dengan IKK, pengambil kebijakan dapat:

- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses kebijakan.
- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam formulasi dan implementasi kebijakan.
- Meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Bab 3: Dimensi-Dimensi Pengukuran IKK

3.1 Relevansi Kebijakan

Dimensi ini mengukur sejauh mana kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata yang terjadi. Kebijakan yang relevan akan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Indikator:

- Kesesuaian kebijakan dengan masalah utama yang dihadapi masyarakat.
- Partisipasi masyarakat dalam identifikasi masalah.

3.2 Konsistensi Internal

Konsistensi internal mengukur apakah kebijakan tersebut saling terintegrasi dan tidak bertentangan dengan kebijakan lain, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Indikator:

- Koherensi antara berbagai kebijakan yang saling terkait.
- Sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

3.3 Efektivitas Kebijakan

Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi ini melihat hasil nyata dari implementasi kebijakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Indikator:

- Tingkat pencapaian target kebijakan.
- Pengaruh kebijakan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dimensi ini mengukur seberapa baik kebijakan memanfaatkan sumber daya yang ada (anggaran, tenaga, waktu) untuk mencapai hasil yang optimal.

Indikator:

- Rasio antara input (anggaran, tenaga, waktu) dan output kebijakan.
- Penggunaan sumber daya yang hemat dan efektif.

3.5 Dampak Jangka Panjang

Dampak mengukur hasil dari kebijakan dalam jangka panjang, termasuk kontribusi kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indikator:

- Dampak positif/negatif dari kebijakan dalam jangka panjang.
- Kontribusi kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.6 Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Keterbukaan dan partisipasi publik menilai sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses formulasi dan evaluasi kebijakan, serta transparansi dalam penyusunan kebijakan.

Indikator:

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Transparansi pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan.

Bab 4: Proses Pengukuran IKK

4.1 Tahapan Pengukuran

Proses pengukuran IKK terdiri dari tiga tahap utama:

1. **Formulasi Kebijakan:** Mengukur kualitas proses penyusunan kebijakan, meliputi keterlibatan stakeholder, penggunaan data, dan bukti ilmiah.
2. **Implementasi Kebijakan:** Mengukur sejauh mana kebijakan diterapkan sesuai rencana dan menghasilkan dampak nyata.
3. **Evaluasi Dampak:** Menganalisis hasil kebijakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

4.2 Metode Pengumpulan Data

- **Survei Stakeholder:** Kuesioner diberikan kepada masyarakat, pegawai pemerintah, dan stakeholder terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap kebijakan.
- **Wawancara Mendalam:** Menggali lebih dalam pandangan dari para pelaksana kebijakan dan ahli tentang implementasi kebijakan.
- **Analisis Data Sekunder:** Menggunakan laporan kebijakan, dokumen pemerintah, dan data statistik untuk mengukur hasil kebijakan.

4.3 Alat Pengukuran

- **Skala Likert 1-5:** Digunakan untuk menilai dimensi IKK berdasarkan persepsi responden.
- **Bobot Dimensi:** Setiap dimensi diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap konteks kebijakan.

LAMPIRAN 1.

Instrumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Instrumen pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dirancang untuk menilai berbagai aspek dari suatu kebijakan publik dengan menggunakan indikator-indikator kunci yang mencakup relevansi, efektivitas, efisiensi, konsistensi internal, dampak, serta keterbukaan dan partisipasi publik. Setiap dimensi diukur menggunakan skala Likert atau metode penilaian kuantitatif dan kualitatif yang sesuai. Berikut adalah struktur instrumen pengukuran IKK.

1. Dimensi dan Indikator

1.1 Relevansi Kebijakan

Menilai sejauh mana kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan relevan dengan masalah yang dihadapi.

- **Indikator:**
 - Apakah kebijakan menjawab kebutuhan yang paling mendesak? (Skala Likert 1-5)
 - Apakah masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini? (Skala Likert 1-5)
 - Seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam identifikasi masalah yang diatasi oleh kebijakan ini? (Skala Likert 1-5)

1.2 Konsistensi Internal

Mengukur apakah kebijakan tersebut konsisten secara internal dan tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang terkait.

- **Indikator:**
 - Apakah kebijakan ini terintegrasi dengan kebijakan nasional/regional yang relevan? (Skala Likert 1-5)
 - Apakah kebijakan ini memiliki koherensi dengan strategi dan program pemerintah lainnya? (Skala Likert 1-5)

1.3 Efektivitas Kebijakan

Menilai apakah kebijakan mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan dampak yang diharapkan.

- **Indikator:**
 - Seberapa besar kebijakan ini mencapai target yang telah ditetapkan? (Skala Likert 1-5)
 - Apakah kebijakan ini memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi masyarakat? (Skala Likert 1-5)
 - Apakah dampak kebijakan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat? (Skala Likert 1-5)

1.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengukur seberapa baik kebijakan menggunakan sumber daya (anggaran, waktu, dan tenaga) untuk mencapai hasil yang optimal.

- **Indikator:**
 - Apakah anggaran yang dialokasikan cukup untuk melaksanakan kebijakan? (Skala Likert 1-5)
 - Apakah sumber daya yang digunakan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan? (Skala Likert 1-5)
 - Apakah waktu pelaksanaan kebijakan sesuai dengan target yang ditetapkan? (Skala Likert 1-5)

1.5 Dampak Jangka Panjang

Mengukur dampak jangka panjang dari kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

- **Indikator:**
 - Apakah kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang? (Skala Likert 1-5)
 - Apakah dampak kebijakan ini dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama? (Skala Likert 1-5)

1.6 Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam proses formulasi dan evaluasi kebijakan.

- **Indikator:**
 - Apakah masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan? (Skala Likert 1-5)
 - Apakah proses pengambilan keputusan kebijakan dilakukan secara transparan? (Skala Likert 1-5)
 - Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi kebijakan? (Skala Likert 1-5)

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk setiap dimensi, data dapat dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

1. **Kuesioner/Survei:** Menggunakan kuesioner berbasis skala Likert (1-5) untuk mengukur persepsi masyarakat, pegawai pemerintah, dan stakeholder terkait terhadap kebijakan.
 - **Contoh Pertanyaan:**
 - "Seberapa relevan kebijakan ini dengan masalah yang Anda hadapi?" (1 = Sangat tidak relevan, 5 = Sangat relevan)
 - "Apakah Anda merasa dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan ini?" (1 = Tidak terlibat sama sekali, 5 = Sangat terlibat)

2. **Wawancara Mendalam:** Untuk memahami secara lebih rinci persepsi dan pengalaman dari pemangku kepentingan utama terkait dengan pelaksanaan dan dampak kebijakan.
 - **Contoh Pertanyaan:**
 - "Bagaimana Anda menilai konsistensi kebijakan ini dengan program lain yang sedang berlangsung di wilayah ini?"
 - "Apa dampak jangka panjang yang Anda harapkan dari kebijakan ini terhadap kesejahteraan masyarakat?"
3. **Focus Group Discussion (FGD):** Diskusi kelompok terfokus dengan masyarakat, akademisi, dan pejabat terkait untuk menggali lebih dalam evaluasi kualitatif terhadap kebijakan yang diukur.
4. **Analisis Data Sekunder:** Menggunakan laporan resmi, statistik, dan dokumen kebijakan yang relevan untuk mendukung penilaian dimensi-dimensi IKK.

3. Analisis dan Interpretasi

Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dianalisis dengan cara berikut:

1. **Penghitungan Skor Rata-Rata:** Skor rata-rata untuk setiap dimensi dihitung dengan menjumlahkan semua nilai yang diberikan responden untuk setiap indikator, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Misalnya, dimensi **Efektivitas Kebijakan** dengan 5 indikator akan menghasilkan skor rata-rata dari seluruh indikator tersebut.
 - **Contoh Penghitungan Skor Rata-Rata Efektivitas:**
 - Indikator 1: Skor rata-rata = 3,5
 - Indikator 2: Skor rata-rata = 4,0
 - Indikator 3: Skor rata-rata = 3,8
 - **Total Rata-Rata Efektivitas = $(3,5 + 4,0 + 3,8) / 3 = 3,77$**
2. **Pemberian Bobot:** Setiap dimensi dalam IKK dapat diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap konteks kebijakan yang diukur. Misalnya, **Efektivitas** dapat diberi bobot 30%, sedangkan **Partisipasi Publik** dapat diberi bobot 10%.
3. **Indeks Total:** Nilai akhir Indeks Kualitas Kebijakan dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap dimensi setelah diberi bobot, sehingga menghasilkan **Indeks Total** yang memberikan gambaran keseluruhan kualitas kebijakan.
 - **Contoh Penghitungan Indeks Total:**
 - Relevansi (20%): 4,2
 - Konsistensi (15%): 3,8
 - Efektivitas (30%): 3,77
 - Efisiensi (15%): 3,2
 - Dampak (10%): 3,9
 - Partisipasi (10%): 4,0
 - **Indeks Kualitas Kebijakan Total = $(4,2 * 0,2) + (3,8 * 0,15) + (3,77 * 0,3) + (3,2 * 0,15) + (3,9 * 0,1) + (4,0 * 0,1) = 3,78$**

LAMPIRAN 2

CONTOH 1.

Evaluasi Kualitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Y menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Pendahuluan

Latar Belakang: Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Y diluncurkan pada tahun 2019 sebagai respons atas meningkatnya volume sampah di perkotaan dan rendahnya tingkat daur ulang. Kebijakan ini mencakup pengurangan sampah melalui pemilahan di sumber, penyediaan fasilitas pengolahan sampah, serta program edukasi untuk masyarakat. Meskipun kebijakan telah diterapkan selama beberapa tahun, efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan sampah dan partisipasi masyarakat masih menjadi pertanyaan.

Rumusan Masalah: Bagaimana kualitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Y berdasarkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), dan bagaimana hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang?

Tujuan Penelitian:

- Menilai kualitas kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan dimensi IKK seperti relevansi, efektivitas, efisiensi, konsistensi, dampak jangka panjang, dan partisipasi publik.
- Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan berdasarkan hasil penilaian IKK.

Manfaat Penelitian: Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Y serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

1. **Kebijakan Pengelolaan Sampah:** Penelitian ini mengacu pada konsep pengelolaan sampah modern yang mencakup pendekatan **reduce, reuse, recycle (3R)** serta pengelolaan berkelanjutan. Kebijakan di banyak kota besar bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah di TPA dan meningkatkan tingkat daur ulang.
2. **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK):** Menurut Duadji (2022), IKK adalah alat yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan berdasarkan beberapa dimensi utama, termasuk relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan partisipasi publik. IKK bertujuan untuk memberikan penilaian objektif terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode **kuantitatif** dengan pendekatan survei. Kuesioner dengan skala Likert (1-5) disebarikan kepada 200 responden yang terdiri dari masyarakat, petugas kebersihan, pejabat pemerintah, dan pengusaha daur ulang.

Populasi dan Sampel: Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Y. Sampel diambil secara acak sebanyak 200 responden, terdiri dari 100 masyarakat, 50 petugas kebersihan, dan 50 pejabat terkait.

Instrumen Pengukuran: Kuesioner disusun berdasarkan dimensi-dimensi IKK:

- **Relevansi:** Apakah kebijakan ini relevan dengan permasalahan sampah di kota?
- **Efektivitas:** Seberapa efektif kebijakan ini mengurangi volume sampah?
- **Efisiensi:** Apakah anggaran dan sumber daya yang digunakan efisien?
- **Konsistensi:** Apakah kebijakan ini sejalan dengan kebijakan lingkungan lainnya?
- **Dampak Jangka Panjang:** Apa dampak jangka panjang dari kebijakan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat?
- **Partisipasi Publik:** Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan ini?

Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara mendalam dengan beberapa pejabat kebersihan kota. Data sekunder berupa laporan kebijakan dan statistik sampah juga digunakan sebagai bahan pendukung analisis.

Analisis Data: Data dianalisis menggunakan **statistik deskriptif** untuk mendapatkan rata-rata nilai dari setiap dimensi IKK. Skor untuk masing-masing dimensi dihitung, dan total **Indeks Kualitas Kebijakan** diperoleh dengan cara menjumlahkan skor rata-rata dari setiap dimensi.

Hasil dan Pembahasan

1. Relevansi Kebijakan

Skor rata-rata untuk relevansi kebijakan adalah **4,0**, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Y sangat relevan dengan masalah yang dihadapi, terutama dalam menangani peningkatan volume sampah di perkotaan. Responden masyarakat menganggap bahwa kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam hal pemilahan sampah.

2. Konsistensi Internal

Skor untuk konsistensi internal adalah **3,6**, menunjukkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan kebijakan lingkungan lainnya, seperti program daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik. Namun, terdapat beberapa kendala dalam koordinasi antar-lembaga, terutama dalam hal pendanaan dan pelaksanaan program.

3. Efektivitas Kebijakan

Skor efektivitas kebijakan adalah **3,4**, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuan utamanya, yaitu pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA. Meskipun ada peningkatan dalam tingkat daur ulang, kurangnya infrastruktur pengolahan sampah menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan ini.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Skor efisiensi adalah **3,2**, yang mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya belum optimal. Banyak responden, terutama petugas kebersihan, melaporkan adanya keterbatasan fasilitas dan anggaran, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara maksimal.

5. Dampak Jangka Panjang

Skor untuk dampak jangka panjang adalah **3,8**, menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi dampak positif terhadap lingkungan dalam jangka panjang, terutama dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan fasilitas pengolahan sampah untuk mencapai dampak yang lebih signifikan.

6. Partisipasi Publik

Skor partisipasi publik adalah **4,2**, yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan sangat baik. Masyarakat terlibat aktif dalam program pemilahan sampah dan kampanye lingkungan. Namun, partisipasi di tingkat perumusan kebijakan masih rendah, yang menyebabkan beberapa kebijakan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan lokal.

Indeks Total Kualitas Kebijakan:

- Relevansi: 4,0
- Konsistensi: 3,6
- Efektivitas: 3,4
- Efisiensi: 3,2
- Dampak Jangka Panjang: 3,8
- Partisipasi Publik: 4,2
- **Indeks Total IKK** = $(4,0 * 0,2) + (3,6 * 0,15) + (3,4 * 0,2) + (3,2 * 0,15) + (3,8 * 0,15) + (4,2 * 0,15) = 3,68$

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Y berada pada kategori "baik" dengan skor IKK sebesar **3,68**. Meskipun kebijakan ini relevan dengan masalah sampah dan melibatkan partisipasi publik yang tinggi, terdapat kelemahan dalam hal efektivitas dan efisiensi, terutama terkait dengan penggunaan sumber daya. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih baik.

Rekomendasi

1. **Meningkatkan Infrastruktur Pengolahan Sampah:** Pemerintah harus memperluas fasilitas pengolahan sampah, terutama di daerah-daerah yang masih minim infrastruktur.
2. **Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga:** Perlu ada sinergi yang lebih baik antara instansi pemerintah terkait untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan.
3. **Peningkatan Partisipasi dalam Formulasi Kebijakan:** Masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam tahap perumusan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
4. **Penguatan Program Edukasi:** Kampanye pengelolaan sampah dan daur ulang perlu diperluas agar masyarakat semakin memahami pentingnya kebijakan ini.

REFERENSI-REFERENSI (Minimal 20)

Contoh 2.

Evaluasi Kualitas Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Z menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Pendahuluan

Latar Belakang: Kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Z melalui program bantuan sosial (Bansos) telah berjalan selama lima tahun, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini mencakup pemberian bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, laporan internal menunjukkan bahwa program ini belum mencapai target penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai kualitas kebijakan ini dengan menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Rumusan Masalah: Bagaimana kualitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Z berdasarkan dimensi IKK, dan apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas kebijakan tersebut?

Tujuan Penelitian:

- Mengukur kualitas kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan IKK.
- Menganalisis efektivitas, relevansi, efisiensi, dan dampak kebijakan Bansos di Kabupaten Z.
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pengentasan kemiskinan di masa depan.

Manfaat Penelitian: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan pengentasan kemiskinan berdasarkan hasil penilaian yang objektif.

Tinjauan Pustaka

1. **Kebijakan Pengentasan Kemiskinan:** Kebijakan pengentasan kemiskinan mencakup program-program bantuan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Banyak literatur menyatakan bahwa kebijakan yang efektif harus berbasis bukti dan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK):** IKK merupakan instrumen penilaian kebijakan yang mencakup dimensi-dimensi seperti relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan partisipasi publik. Menurut Tresiana (2021), penggunaan IKK dalam menilai kebijakan pengentasan kemiskinan memberikan wawasan yang jelas tentang sejauh mana kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan metode survei. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari penerima manfaat Bansos, aparatur

desa, serta pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Z. Kuesioner berbasis skala Likert (1-5) digunakan untuk menilai setiap dimensi IKK.

Populasi dan Sampel: Populasi penelitian ini adalah seluruh penerima manfaat Bansos di Kabupaten Z. Sampel penelitian terdiri dari 300 responden yang dipilih secara acak, terdiri dari 200 penerima manfaat, 50 aparatur desa, dan 50 pejabat Dinas Sosial.

Instrumen Pengukuran: Instrumen pengukuran disusun berdasarkan dimensi-dimensi IKK:

- **Relevansi:** Apakah kebijakan Bansos ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin?
- **Efektivitas:** Seberapa besar program ini mengurangi angka kemiskinan?
- **Efisiensi:** Apakah anggaran dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan hasil yang diperoleh?
- **Konsistensi:** Apakah kebijakan ini selaras dengan program nasional pengentasan kemiskinan?
- **Dampak Jangka Panjang:** Apa dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dalam jangka panjang?
- **Partisipasi Publik:** Apakah masyarakat dilibatkan dalam formulasi dan evaluasi program ini?

Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Sosial, serta dokumen-dokumen laporan kebijakan yang relevan. Data sekunder berupa statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Z juga digunakan untuk mendukung analisis.

Analisis Data: Data dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menghitung skor rata-rata setiap dimensi IKK. Skor total IKK diperoleh dengan menjumlahkan skor rata-rata setiap dimensi yang telah diberikan bobot.

Hasil dan Pembahasan

1. Relevansi Kebijakan

Skor rata-rata untuk relevansi kebijakan adalah **4,1**, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin di Kabupaten Z. Sebagian besar responden merasa bahwa program Bansos membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan anak-anak.

Relevansi kebijakan menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Z dianggap sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Berdasarkan hasil survei, 85% responden penerima manfaat bantuan sosial (Bansos) merasa bahwa program ini relevan dengan kondisi ekonomi mereka, terutama karena fokus bantuan tunai yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan dan pendidikan anak-anak.

Program pelatihan keterampilan yang diinisiasi oleh pemerintah juga mendapat apresiasi, meskipun cakupannya masih terbatas di beberapa desa. Banyak penerima bantuan menyatakan bahwa pelatihan ini memungkinkan mereka untuk memperoleh keterampilan tambahan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha kecil. Namun, di beberapa wilayah yang lebih terpencil, pelaksanaan pelatihan keterampilan masih belum merata.

2. Konsistensi Internal

Skor untuk konsistensi internal adalah **3,9**, menunjukkan bahwa kebijakan Bansos ini selaras dengan kebijakan pengentasan kemiskinan nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, ada masalah dalam koordinasi antar-lembaga, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pusat.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Z relatif konsisten dengan kebijakan nasional, terutama dalam hal selarasnya program Bansos dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Sebagian besar pejabat Dinas Sosial menyatakan bahwa kebijakan lokal ini sudah sesuai dengan regulasi nasional dan mengikuti panduan dari Kementerian Sosial.

Namun, dalam hal pelaksanaan di lapangan, ada beberapa ketidaksesuaian dalam pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, program bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin yang diatur oleh pemerintah pusat tidak terkoordinasi dengan baik dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga menyebabkan duplikasi program di beberapa wilayah.

3. Efektivitas Kebijakan

Skor efektivitas kebijakan adalah **3,5**, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Meskipun ada peningkatan kesejahteraan jangka pendek, program ini masih belum cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat miskin.

Efektivitas kebijakan diukur melalui sejauh mana kebijakan ini berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Z. Meskipun terdapat beberapa peningkatan kesejahteraan pada keluarga penerima manfaat, data menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Z hanya turun 1,5% dalam tiga tahun terakhir, meskipun pemerintah menargetkan penurunan hingga 3% per tahun.

Program pelatihan keterampilan yang seharusnya menciptakan kemandirian ekonomi belum optimal dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Banyak penerima bantuan merasa bahwa mereka tidak memiliki akses ke modal atau pasar untuk memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh, sehingga efektivitas program tersebut dalam mengangkat ekonomi masyarakat masih terbatas.

Selain itu, efektivitas program Bansos juga terhambat oleh keterlambatan dalam penyaluran bantuan tunai di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota. Keterlambatan ini mempengaruhi ketergantungan masyarakat pada bantuan tersebut.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Skor efisiensi adalah **3,3**, yang menunjukkan bahwa anggaran dan sumber daya manusia yang digunakan belum optimal. Beberapa desa melaporkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan ketidakcukupan alokasi dana untuk kebutuhan lokal.

Efisiensi kebijakan diukur melalui penggunaan anggaran dan sumber daya manusia yang ada. Hasil survei menunjukkan bahwa 60% aparatur desa dan petugas Dinas Sosial merasa bahwa alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan belum optimal. Hal ini terutama terlihat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, di mana anggaran yang diberikan sering kali tidak cukup untuk mendukung usaha masyarakat miskin.

Terkait sumber daya manusia, petugas di lapangan melaporkan bahwa jumlah tenaga pendamping sosial tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat, sehingga pelaksanaan program di beberapa daerah menjadi kurang efisien. Selain itu, 45% responden aparatur desa juga melaporkan bahwa keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil menyebabkan distribusi bantuan tunai sering terlambat, yang berdampak pada ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan.

5. Dampak Jangka Panjang

Skor untuk dampak jangka panjang adalah **3,7**, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, masih ada tantangan dalam pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak jangka panjang kebijakan ini diukur melalui pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Program Bansos dan pelatihan keterampilan telah memberikan dampak positif pada penerima manfaat dalam jangka pendek, namun masih ada keraguan tentang dampak jangka panjang. Sebagian besar penerima bantuan melaporkan peningkatan kualitas hidup mereka setelah menerima bantuan tunai dan pelatihan keterampilan.

Namun, dampak ini belum sepenuhnya berkelanjutan karena sebagian besar penerima bantuan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, belum ada data yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam indikator kemandirian ekonomi seperti penghasilan tetap atau penciptaan lapangan kerja baru.

Dampak kebijakan ini juga diukur dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, di mana kebijakan ini dinilai berhasil. Anak-anak dari keluarga penerima manfaat lebih banyak yang tetap bersekolah, dan akses layanan kesehatan juga meningkat berkat program bantuan biaya kesehatan.

6. Partisipasi Publik

Skor partisipasi publik adalah **4,0**, yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup dilibatkan dalam evaluasi program. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan Bansos, meskipun partisipasi dalam proses perumusan kebijakan masih perlu ditingkatkan.

Partisipasi publik dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dinilai cukup baik, terutama dalam evaluasi program. Banyak penerima manfaat dilibatkan dalam survei kepuasan dan diminta memberikan masukan terkait implementasi program. 70% responden masyarakat menyatakan bahwa mereka merasa terlibat dalam evaluasi program, meskipun sebagian besar partisipasi tersebut terjadi di tingkat pelaksanaan, bukan dalam tahap perumusan kebijakan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan perumusan kebijakan masih terbatas. Sebagian besar kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah tanpa konsultasi yang luas dengan masyarakat. Aparatur desa melaporkan bahwa usulan dari masyarakat sering

kali tidak diakomodasi secara penuh dalam rencana kebijakan, meskipun survei dilakukan secara berkala.

Indeks Total Kualitas Kebijakan:

- Relevansi: 4,1
- Konsistensi: 3,9
- Efektivitas: 3,5
- Efisiensi: 3,3
- Dampak Jangka Panjang: 3,7
- Partisipasi Publik: 4,0
- **Indeks Total IKK** = $(4,1 * 0,2) + (3,9 * 0,15) + (3,5 * 0,2) + (3,3 * 0,15) + (3,7 * 0,15) + (4,0 * 0,15) = 3,73$

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kabupaten Z berada pada kategori "baik" dengan skor IKK sebesar **3,73**. Meskipun kebijakan ini relevan dan konsisten dengan kebijakan nasional, terdapat kelemahan dalam efektivitas dan efisiensi implementasi, terutama terkait dengan penggunaan sumber daya dan penciptaan kemandirian ekonomi bagi masyarakat miskin.

Rekomendasi

1. **Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pelatihan keterampilan dan akses terhadap modal usaha bagi masyarakat miskin.
2. **Perbaikan Koordinasi Antar-Lembaga:** Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk memastikan penyaluran bantuan yang lebih efektif dan efisien.
3. **Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan:** Keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan dalam tahap perumusan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan lokal.
4. **Penguatan Program Evaluasi:** Pemerintah perlu memperkuat sistem evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan target dan memberikan dampak yang diharapkan.

REFERENSI-REFERENSI (MINIMAL 20)